

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013
DI SEKOLAH DASAR PLUS AL-ASHRI KECAMATAN BIRINGKANAYA
KOTA MAKASSAR**

**TAUFIQ HIDAYAT
E211 14 519**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**



ABSTRAK

Taufiq Hidayat/(E21114519), Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. xvi + 114 halaman + 13 Tabel + 3 Gambar + 16 Pustaka + 17 Lampiran + Dibimbing oleh Dr. Nurdin Nara, M.Si. dan Adnan Nasution, S.Sos., M. Si.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan skunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan indikator teori Van Meter dan Van Horn diantaranya yaitu terpenuhinya tenaga pendidik yang berkualitas dan finansial Sekolah Dasar Plus Al-Ashri, juga keaktifan guru sebagai agen pelaksana kebijakan dalam menciptakan kegiatan fisik dan seni telah memenuhi indikator aktivitas pelaksana.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, diantaranya adalah minimnya pemahaman para tenaga pendidik di awal penerapan kebijakan yang disebabkan kurangnya pelatihan yang di dapatkan, perlunya komunikasi dan koordinasi antara pihak Sekolah dengan orang tua siswa mengenai pembentukan karakter siswa, perlunya evaluasi pemerintah terhadap sistem penulisan raport siswa pada kebijakan kurikulum 2013.

Kata kunci: Evaluasi, Implementasi Kebijakan, Kurikulum, Observasi.



ABSTRACT

Taufiq Hidayat/(E211 14 519), The Implementation of Curriculum Policy 2013 at Elementary School of Plus Al-Ashri Sub District Biringkanaya of Makassar. xvi + 114 Pages + 13 Tables + 3 Pictures + 16 Library + 17 Appendix + Guided by Dr. Nurdin Nara, M.Si. and Adnan Nasution, S.Sos., M. Si.

This study aims to determine the implementation of the 2013 curriculum policy in Al-Ashri Plus Elementary School. The research approach used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques; interviews, observation, and document study, while the data sources used are primary and secondary data.

The results of this study indicate that the implementation of curriculum policy in Al-Ashri Plus Elementary School, Biringkanaya District, Makassar City has been going well. This is evidenced by the results of observations and interviews using the Van Meter and Van Horn theory indicators, including the fulfillment of qualified and financial educators at the Al-Ashri Plus Elementary School, as well as the activeness of teachers as policy implementing agents in creating physical and artistic activities that meet the activity indicators of the implementors.

However, there are still a number of things that need to be fixed, including the lack of understanding of educators at the beginning of policy implementation due to the lack of training received, the need for communication and coordination between the school authorities and parents of the students regarding the developing of student's character, the government needs to evaluate the student report entry system in the 2013 curriculum policy.

Keywords: Evaluation, Implementation of Policy, Curriculum, Observation.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Taufiq Hidayat

NIM : E211 14 519

Program Studi : Ilmu Administrasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar* adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 29 Januari 2021



Penulis

Taufiq Hidayat
E211 14 519



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Taufiq Hidayat
NIM : E211 14 519
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.*

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah layak untuk ujian skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 Januari 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002

Pembimbing II

Adnan Nasution, S.Sos., M.Si.
NIP 19740707 200501 1001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Taufiq Hidayat
NIM : E211 14 519
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.*

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 29 Januari 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002

Adnan Nasution, S.Sos., M.Si.
NIP 19740707 200501 1001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat , hidayah, dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”***. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya kejalan yang lebih baik. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dalam menyusun penelitian ini penulis menghadapi berbagai kendala sehingga penulis mengucapkan banyak syukur dan terima kasih kepada semua orang yang ikut berperan penting dalam penyusunan penelitian utamanya orang-orang terdekat penulis yaitu; Orang tua penulis, Almarhum Bapak **Abd. Latif. T** dan Ibu **Marhuma**, Saudara Penulis Kak **Sukmawati, S. Pd.** dan kak **Suardi Latif** terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya selama penulis mengenyam pendidikandibangku perkuliahan, juga **Ayu Angraeni Asmar, S.S.** terima kasih atas pengorbanannya menemani penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan di masa-masa sulit dan senang. Serta Keluarga Besar **Caharia Sonata**, terima kasih atas dukungan dan motivasinya kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Staff dan Jajarannya.
2. **Prof. Dr. Armin Arsyad** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Staff dan Jajarannya.
3. **Dr. Nurdin Nara, M.Si.**, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, sekaligus Dosen Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada penulis.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, M. A. P** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan juga selaku penguji yang telah menyempatkan waktu memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Adnan Nasution, S.Sos, M.Si.**, Selaku Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing II, terima atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.

6. **Irma Ariyanti Arif, S. Sos., M.Si** selaku Dosen penguji yang telah menyempatkan waktu memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen **Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** selama perkuliahan, terima kasih atas didikan, arahan dan motivasinya selama ini.
8. Terima kasih banyak untuk Keluarga Besar **Reborn Cartel Indonesia** utamanya kepada **Pap Don** terima kasih telah menerima saya sebagai keluarga di Cartel dan memberikan saya banyak pelajaran hidup dan membantu saya disaat kesusahan dan kepedihan melanda, sekali lagi terima kasih Pap.
9. Segenap Staff Departemen Ilmu **Administrasi** dan **Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** yang telah membantu dan melancarkan berkas ujian skripsi penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gel-102 Desa Melle, Kabupaten Bone, **Fadil, Wahyu, Eni, Tri, Mae, Fanya**.
11. Terima kasih untuk saudara sepupu, **Kak Anti, Kak Aci, Kak Yoga, Almarhum Kak Cuplis, Kak Anton, Kak Agung, Ryan, wawan**, telah mendukung penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
12. Terima kasih untuk keponakan tersayang **Fail, Fifi, Faqih dan Cica**.

Peneliti menyadari penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan.

Peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan

dan perbaikannya sehingga akhirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amiin.

Makassar, 28 Januari 2021

Penulis

Taufiq Hidayat
E211 14 519

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	10
I.3. Tujuan Penelitian	10
I.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	13
II.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan	13
II.1.2. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan	23
II.1.3. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan.....	28
II.2. Konsep Kurikulum	34
II.2.1. Pengertian Kurikulum	34
II.2.2. Pengertian Kurikulum 2013	36
II.2.3. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013.....	37
II.3. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
III.2. Lokasi Penelitian.....	41
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian	42

III.4. Narasumber atau Informan	43
III.5. Sumber Data.....	43
III.6. Teknik Pengumpulan Data	44
III.7. Teknik Analisis Data	47
III.8. Fokus Penelitian	48

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

IV.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
IV.1.1. Peta Kecamatan Biringkanaya.....	52
IV.1.1.1. Letak, Luas, dan Kondisi Geografis Kecamatan Biringkanaya	52
IV.1.2. Profil Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	53
IV.1.2.1. Identitas Sekolah	53
IV.1.2.2. Profil Sekolah	55
IV.1.2.2.1. Jumlah Siswa SD Plus Al-Ashri.....	55
IV.1.2.2.2. Jumlah Rombongan Belajar	55
IV.1.2.2.3. Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi.....	55
IV.1.2.2.4. Jumlah Guru Berdasarkan Status.....	55
IV.1.2.2.5. Jumlah Staff Sekolah	56
IV.1.2.2.6. Jumlah Ruang Kelas.....	56
IV.1.2.2.7. Fasilitas Sekolah	57
IV.1.2.2.8. Kualifikasi Tenaga Pendidik.....	57
IV.1.3. Visi dan Misi Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	60
IV.1.3.1. Visi Sekolah Dasar Plus Al-Ashri.....	60
IV.1.3.2. Misi Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	61
IV.1.3.3. Tujuan Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	61
IV.1.3.4. Struktur Sekolah Dasar Plus Al-Ashri.....	62
IV.1.4. Tugas Pokok.....	63

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	67
V.1.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	67

V.1.2. Sumber Daya	69
V.1.2.1. Manusia	70
V.1.2.2. Finansial	73
V.1.2.3. Waktu	77
V.1.3. Karakteristik Agen Pelaksana	80
V.1.4. Sikap atau Kecenderungan para pelaksana	82
V.1.5. Komunikasi Antar Organisasi & Aktivitas Pelaksana	88
V.1.5.1. Komunikasi Antar Organisasi	90
V.1.5.2. Aktivitas Pelaksana	95
V.1.6. Lingkungan Sosial & Politik	104
V.1.6.1. Lingkungan Sosial	105
V.1.6.2. Lingkungan Politik	108
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
VI.1. Kesimpulan	110
VI.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Persamaan & Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	8
Tabel I.2. Persamaan & Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	9
Tabel IV.1. Letak, Luas, dan Kondisi Geografis Kecamatan Biringkanaya	53
Tabel IV.2. Identitas Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	53
Tabel IV.3. Jumlah Siswa Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	55
Tabel IV.4. Jumlah Kelas Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	55
Tabel IV.5. Jumlah Guru Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	55
Tabel IV.6. Jumlah Guru Berdasarkan Status di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	56
Tabel IV.7. Jumlah Staff Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	56
Tabel IV.8. Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	56
Tabel IV.9. Fasilitas Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	57
Tabel IV.10. Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	57
Tabel IV.11. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar IV.1 Peta Kecamatan Biringkanaya	52
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Sekolah Dasar Plus Al-Ashri	62

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. latar Belakang

Menciptakan sebuah bangsa dan negara yang maju dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, karena Kemajuan suatu bangsa dan negara dapat dilihat melalui kualitas Sumber Daya Manusiannya (SDM). Oleh sebab itu, Kualitas pendidikan dan peran pendidik sangat berperan penting dalam menghasilkan generasi atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing dalam skala Global demi tercapainya cita-cita bangsa seperti yang tertera pada UUD alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, komponen dalam sistem pendidikan harus dikembangkan seiring dengan berkembangnya Zaman. Salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum.

Kurikulum dapat dikatakan sebagai sebuah harapan karena menjadi acuan atau arahan bagaimana proses belajar mengajar itu berjalan, sedangkan tenaga pendidik dan peserta didik menjadi pewujud harapan ketika proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik, yang artinya kurikulum dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan ketika komponen-komponen sistem pendidikan bersinergi sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan.

Kurikulum pada pasal 36 ayat (3) UU No.20 Tahun 2003 menjelaskan berbagai aspek pengembangan kepribadian peserta didik yang menyeluruh dan

pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan tantangan kehidupan global. Yang berarti sebuah kurikulum sangat penting untuk menjawab sebuah permasalahan dengan menyesuaikan pada kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan pada setiap jenjang pendidikan. Maka hal tersebut menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem pendidikan, terutama dalam hal yang menyangkut sebuah pengembangan ide untuk menciptakan rancangan pendidikan yang dapat berjalan baik dalam proses pembelajaran untuk mencapai cita-cita pendidikan Nasional.

Untuk menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing secara Global maka sebuah rancangan harus mengikuti arus perkembangan Zaman. Seperti yang kita ketahui, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tercatat kurikulum pendidikan di Indonesia telah berganti berkali-kali sejak merdeka di tahun 1945 hingga diterapkannya kurikulum 2013 sebagai bentuk perbaikan ataupun kritik terhadap kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya yaitu kurikulum 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perubahan tersebut tentunya telah melalui beberapa pertimbangan dan diterapkan secara bertahap dengan melihat bagaimana pencapaian kurikulum sebelumnya setelah di implementasikan. Pengembangan kurikulum 2006 (KTSP) menjadi kurikulum 2013 didasari dengan pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad ke 21 atau abad ilmu pengetahuan, *knowledge-based society*, serta kompetensi masa depan.

Kemendikbud 2013 dalam (Shobirin, 2016) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum 2006 (KTSP) menjadi kurikulum 2013 dikarenakan pada kurikulum 2006 (KTSP) masih terdapat banyak kekurangan di antaranya sebagai berikut:

1. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
2. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
3. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.
4. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.

Berdasarkan poin pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dari kurikulum sebelumnya dengan harapan kurikulum yang baru dapat menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Hingga pada saat ini kurikulum 2013 sebagai kurikulum

baru masih menjadi topik pembahasan yang menarik untuk dibicarakan dalam lingkup dunia pendidikan di Indonesia.

(Hidayat, S., 2017: 128) juga merumuskan beberapa perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013 sebagai berikut: standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemudian, kegiatan pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dilingkungan Sekolah dan masyarakat. Sehingga, guru bukan satu-satunya sumber belajar, serta dalam menerapkan kompetensi sikap guru tidak mengajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan dalam kegiatan proses pembelajarannya diharapkan dapat melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa yang disesuaikan dengan ketentuan dalam kurikulum 2013, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan.

Pada tahapan awal dilaksanakan uji coba kurikulum 2013 sejak tahun ajaran baru 2013/2014 yaitu pada bulan Juli 2013. Uji coba dilakukan pada Sekolah sasaran sekitar 6.200 Sekolah di seluruh Indonesia. Sementara di Provinsi Sulawesi-Selatan ada sekitar 800 Sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK yang menjadi Sekolah uji coba pelaksanaan kurikulum 2013. (Komisi X DPR RI, 2014) Pada kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi-Selatan

yang diketuai oleh H. M. Sohibul Iman, Ph.D. Pada tanggal 4 Desember 2014 berjalan lancar meskipun banyak kendala dan persoalan yang memerlukan penanganan yang memadai. (<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K10-12:14/02/2020>).

Dari 15 kecamatan yang ada di kota Makassar, untuk Kecamatan Biringkanaya: Sekolah Dasar Plus Al-Ashri yang terletak di Jl. Regency Barat. Blok F No.24-26, Paccerakkang terpilih menjadi Sekolah percontohan untuk penerapan kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru, di mana pada saat itu Sekolah Dasar Plus Al-Ashri dengan status Sekolah Swasta yang dibawah oleh sebuah Yayasan menjadi satu-satunya Sekolah Percontohan untuk semua Sekolah yang ada di Kecamatan Biringkanaya baik itu untuk Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta. Hal yang membedakan Sekolah Dasar Plus Al-Ashri dengan sekolah lainnya adalah Kurikulum yang dikombinasikan dengan ajaran Islam yang menekankan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran seperti Al-Quran dan hadits, Aqidah dan Akhlak, Sejarah Islam dan Fiqih yang merupakan kurikulum lokal dari yayasan yang membawahi SD Plus Al-Ashri itu sendiri, sehingga hal tersebut pulalah yang menjadi nilai Plus dari SD Plus Al-Ashri.

Namun dalam pra-observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika menemui Ibu Nuraeni selaku Koordinator bagian kurikulum Sekolah Dasar Plus Al-Ashri menjelaskan bahwa, “meski Sekolah kami menjadi satu-satunya Sekolah Percontohan yang ada di Kecamatan Biringkanaya sejak diterapkannya kurikulum

2013, “kami sebagai tenaga pendidik menemukan banyak kendala di awal penerapan, di mana tenaga pendidik harus keteteran dan melakukan perubahan rancangan pembelajaran secara mendadak karena materi yang dipersempit dan harus disatukan dan harus menunggu ketersediaan buku yang sesuai dengan kurikulum 2013, serta pelatihan pertama yang dilakukan hanya untuk 3 tenaga pendidik sehingga membuat guru-guru lainnya kurang memahami penerapan kurikulum 2013 tersebut.” (kunjungan pra-observasi pada tanggal 15/02/2020)

Namun seiring penerapan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri, dalam 2 tahun terakhir guru-guru mampu meminimalisir kendala-kendala dalam proses belajar-mengajar (PBM) selain karena semua guru telah mengikuti pelatihan dan memahami implementasi kurikulum 2013, sarana dan prasarana dalam sekolah juga terbilang memadai seperti terdiri dari 6 ruang kelas full *air conditioner (AC)*, 3 Perpustakaan dan sudut baca untuk setiap kelas, 3 Lab penyimpanan alat-alat peraga serta praktikum, serta 1 Musholla. Di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri memiliki 28 guru tetap dan 0 guru tidak tetap (atau masih dalam uji coba dalam jangka 3 Bulan sesuai dengan aturan Sekolah Dasar Plus Al-Ashri), 2 staff, 3 penjaga Sekolah, 1 kepala Sekolah, dan 1 Ibu Yayasan sebagai pemilik Sekolah.

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, terdapat beberapa organisasi yang terlibat dalam proses pengimplementasian kebijakannya. Diantaranya, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Tim Pengawas Tingkat Sekolah Dasar, Komite

Sekolah, serta Sekolah Dasar Plus Al-Ashri itu sendiri. Jika Sekolah yang berada di Pedesaan mengalami kendala pada letak Geografis dalam penerapan kurikulum 2013, lain halnya dengan Sekolah yang letaknya berada di Daerah Perkotaan, seperti kendala yang dihadapi di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri dalam proses pembentukan karakter seperti yang diharapkan dalam kurikulum 2013, kendala tersebut terletak pada pengaruh lingkungan atau pengaruh internal siswa itu sendiri dikarenakan mayoritas orang tua siswa yang bekerja kantoran maka tak sedikit orang tua yang mempercayakan anaknya sepenuhnya pada pihak Sekolah seperti gambaran yang terjadi di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri hingga saat ini, tak sedikit orang tua yang bekerja kantoran membiarkan anaknya untuk tetap di Sekolah hingga petang menunggu jemputan di Sekolah karena mempercayakan anaknya sepenuhnya dilingkungan Sekolah, di mana hal ini sangat jelas bertolak belakang dengan capaian kurikulum 2013 dalam pembentukan karakter karena telah dijelaskan dalam kurikulum 2013 bahwa pembentukan karakter tidak sepenuhnya harus didapatkan dalam lingkungan Sekolah. Namun, orang tua harus turut serta mengambil peran di dalamnya. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nuraeni selaku Koordinator Kurikulum di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu sekolah yang terpilih sebagai sekolah percontohan untuk diterapkannya kebijakan kurikulum 2013 terutama pada sekolah swasta yakni Sekolah Dasar Plus Al-Ashri, dengan berfokus pada sisi implementasi

kebijakan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Namun sebelum melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan inspirasi dari beberapa peneliti sebelumnya yang telah meneliti tentang Implementasi Kurikulum 2013. Berikut pemaparan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini dipaparkan sebagai batasan agar berbeda dengan penelitian yang pernah ada dan sebagai acuan atau penyempurna untuk penelitian kedepannya. Berikut beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya yaitu; (Prawira Diharja, 2017) dan (Aviv Budiman, 2015).

(Prawira Diharja, 2017), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung. Dalam skripsi yang berjudul ***Implementasi Kurikulum 2013 Dalam meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI Siswa di SMAN 5 Bandar Lampung.*** Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Prawira Diharja, 2017) adalah;

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Berfokus pada implementasi kebijakan kurikulum 2013	Lokasi penelitian terletak pada kota yang berbeda
Pendekatan Penelitian (deskriptif kualitatif)	Lokus penelitian pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
Teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dengan menggunakan teknik triangulasi.	Tidak menggunakan model teori pengimplementasian kebijakan dalam kerangka pikirnya.

	Variabel penelitian berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
--	---

Penelitian yang mengangkat tema implementasi kurikulum 2013 berikutnya adalah penelitian dari (Aviv Budiman, 2015), Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Dalam skripsi berjudul ***Implementasi Kurikulum 2013 di SMK Ma'Arif Salam***. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Aviv Budiman, 2015) adalah;

Tabel 1.2. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Berfokus pada Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013	Lokasi penelitian terletak pada kota yang berbeda
	Lokus penelitian berada pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan
	Menggunakan teori kependidikan dalam (kerangka pikir berbeda)
	Variabel penelitian berfokus pada kesiapan para guru
	Teknik pengumpulan data menggunakan multi metode berupa angket.

Dalam proses penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, dalam teori ini terdapat enam variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para pelaksana, dan lingkungan sosial dan politik, maka untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut

peneliti mengangkat judul ***“Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.***

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan pada penelitian ini adalah *“Bagaimana implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.?”*

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.*

I.4. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu mengetahui implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan usaha pendidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ke dalam proses

pembelajaran sehingga dapat menjadikan perbaikan kualitas pendidikan dan kinerja pendidik Sekolah Dasar Plus Al-Ashri. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi kontribusi bahan acuan bagi peneliti lain, bagi praktisi kurikulum maupun bagi guru dalam mengkaji masalah implementasi kurikulum 2013 dari sudut pandang yang berbeda agar dapat dijadikan sebagai pembanding. Pertimbangan dan pengembangan pada penelitian yang sejenis dalam bidang pendidikan untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam kegiatan mengajar, serta dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan dapat mencari solusi dari kendala yang ada sehingga menjadikan motivasi guru untuk meningkatkan keprofesionalan guru dan inovasi dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran dan dapat mengetahui usaha yang dilakukan di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri. Selain itu, dapat menjadi rujukan ketika sudah berkecimpung di Sekolah serta menambah pengetahuan dan pemahaman dalam

proses pembelajaran ataupun sebagai penambah ilmu pengetahuan dan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya.

c. Bagi Pemerintah

Dapat mengetahui bagaimana implementasi kurikulum 2013 di lapangan, supaya dapat menjadi bahan kajian lebih serius tentang kurikulum ini. Selain itu, mampu memberikan perbandingan dan tambahan wacana dalam pendidikan terutama untuk mendukung gerakan peningkatan mutu pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Peneliti memaparkan tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teori yang peneliti kumpulkan dari beberapa sumber literatur.

II. 1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

II.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam artian yang luas, implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (*Public* atau *privat*), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang di kehendaki.

Sejalan dengan itu, implementasi memiliki pengertian dari beberapa ahli, yakni menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, Solichin. A. 2012: 135) mengartikan bahwa:

“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision.”(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Pemandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di

bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

Pengertian implementasi yang dijelaskan Van Meter dan Van Horn pun dijelaskan pula oleh kamus Kamus Webster dalam (Wahab, Solichin. A. 2012: 135) yang mengartikan bahwa implementasi adalah:

“Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to Implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).”

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti untuk mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain dijelaskan oleh Webster, dijelaskan pula oleh Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, Solichin. A, 2012: 135) bahwa implementasi yaitu:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.”

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar *aplicable* di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk di implementasikan karena tanpa di implementasikan, kebijakan tersebut hanya akan menjadi coretan semata. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Dari uraian pengertian implementasi kebijakan secara umum, sejalan dengan definisi para ahli, menurut Edwards III dalam (Winarno, B., 2016: 155) menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan dengan cara melalui formulasi kebijakan derivasi atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari uraian pengertian implementasi kebijakan di atas, disimpulkan bahwa prinsip dibuatnya kebijakan publik yang terpenting tidak lain agar sebuah kebijakan publik yang terpenting tidak lain agar sebuah kebijakan mencapai tujuan dari hasil akhirnya. Ada dua langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik, di antaranya langsung dilaksanakan melalui program dan dengan cara membuat perumusan kebijakan turunan (derivasi) dari kebijakan tersebut. Dari uraian pengertian implementasi kebijakan di atas, sejalan dengan definisi ahli, menurut Edwards III dalam (Winarno, B., 2016: 155) mengatakan “implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.”

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Ada beberapa langkah-langkah agar suatu implementasi kebijakan dapat dilakukan, sejalan dengan pendapat (Dwidjowijoto, 2003: 243) memberikan langkah-langkah implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Penerimaan kebijakan, pemahaman publik bahwa kebijakan adalah “aturan Permainan” untuk mengelola masa depan.
2. Adopsi kebijakan. Publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan permainan” untuk mengelola masa depan.
3. Kesiapan strategis. Publik siap untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi utama.

Dari pengertian di atas, diartikulasikan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif sesuai dengan harapan jika masyarakat dapat memahami suatu kebijakan tersebut dibuat untuk mengelola masa depan masyarakat di dalam siklus kehidupan bernegara, maka masyarakat perlu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan begitu sinergitas masyarakat dengan pemerintah terhadap suatu kebijakan tersebut sangat penting agar terjadinya kesesuaian antara kebijakan yang dibuat terhadap kepentingan masyarakat. Peran partisipatif dari masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi dan ikut terlibat dalam implementasi kebijakan sebagai upaya menghindari kesenjangan di dalamnya dengan didukung oleh birokrasi yang berkapasitas dan berintegritas demi tujuan kebijakan yang sesuai harapan pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

Sejalan dengan itu Dwidjowijoto pun menyatakan bahwa ada tantangan implementasi kebijakan berikutnya di Negara-negara berkembang seperti contohnya di Indonesia adalah "*timing*". Ketika kebijakan harus diimplementasikan, lalu bagaimana jenis implementasi kebijakan yang tepat pada suatu kondisi tertentu untuk menghadapinya. Hal tersebut diutarakan menurut (Dwidjowijoto, 2003: 246) bahwa implementasi kebijakan normalnya memiliki empat fase, terdiri dari: Sosialisasi, Implementasi kebijakan, Kontrol implementasi, dan Evaluasi.

Dari keempat fase tersebut, merupakan langkah tepat saat masa di mana suatu implementasi kebijakan terbentur oleh permasalahan ketepatan waktu atau *timing*. Hal tersebut menjadi kendala manakala pelaksanaan daripada kebijakan yang memang sangat memerlukan tindakan sesegera mungkin kebijakan itu dapat dilakukan, sehingga pelaksanaan kebijakan memiliki ketepatan waktu pada suatu kondisi tertentu.

Ahli lain memiliki persepsi tentang tahapan dalam proses suatu implementasi kebijakan, menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam (Wahab, Solichin. A. 2012: 128) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I; Terdiri atas kegiatan- kegiatan:

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
2. Menentukan standar pelaksanaan;
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II; Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III; Merupakan kegiatan-kegiatan:

1. Menentukan jadwal;
2. Melakukan pemantauan;

3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan sesegera mungkin.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, senada dengan kutipan pengertian implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2012: 135) yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan merupakan fokus perhatian daripada implementasi kebijakan. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan Negara.

Lalu pendapat yang lain tentang langkah-langkah suatu implementasi kebijakan, menurut pandangan Mazmanian dan Sabatier dalam (Agustino, 2016: 145) sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah yang akan digarap;
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat;
3. Variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

Dalam siklus kebijakan publik, dengan demikian tindakan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Implementasi kebijakan dengan demikian merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Maka dari itu langkah-langkah implementasi kebijakan perlu diperhatikan dalam proses kebijakan. Sebab aspek implementasi adalah yang akan menentukan 60% keberhasilan ataupun keefektifitasan suatu kebijakan dibuat. (Tachjan, 2006: 26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana, adalah *implementor* kebijakan;
2. Adanya program yang dilaksanakan;
3. Target *group* atau kelompok sasaran.

Dari tiga unsur implementasi kebijakan di atas, (Tachjan, 2006: 28) memberi penjelasan, sebagai berikut:

Unsur Pelaksana; pentingnya unsur pelaksana dijelaskan menurut Dimock & Dimock dalam (Tachjan, 2006: 28) bahwa pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program,

pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam (Tachjan, 2006: 27) mengartikan:

"Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant".

Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik di mana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Adanya program yang dilaksanakan; suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam (Tachjan , 2006: 31) mengartikan bahwa *"Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect"*. Menurut Terry dalam (Tachjan, 2006: 31) yakni:

"A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets".

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu

dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan biaya.

Target group atau kelompok sasaran; pentingnya suatu kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan dijelaskan (Tachjan, 2006: 35) mendefinisikan bahwa: "target *group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti; besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Sejalan dengan pengertian di atas, gagasan yang sama disempurnakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2016: 148) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

1. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
2. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
3. Vitalitas suatu organisasi;

4. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
5. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksanaan keputusan”.

Pendapat yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila *implementor* memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya apabila *implementor* tidak memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka akan berdampak menjadi tidak berhasil kinerja implementasi kebijakan serta tidak sesuai dengan harapan daripada pembuat kebijakan itu sendiri. Dengan demikian persoalan kapabilitas menyangkut keenam aspek yang telah diuraikan di atas.

II.1.2 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Untuk memperdalam pemahaman tentang komponen variabel apa saja yang terlibat dalam proses penelitian ini, maka peneliti menjabarkan teori model Implementasi Kebijakan dari para ahli yaitu Van Meter dan Van Horn seperti sumber *literatur* di bawah ini:

A. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang di perkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Dwidjowijoto, 2003: 167) “Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, *implementor*, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimaksudkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
2. Karakteristik dari agen pelaksana/*implementor*.
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan
4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau *implementor*.

Model pendekatan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan secara rinci variabel- variabel tersebut yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan dalam (Agustino, 2016). Van Meter dan Van Horn dalam (Widodo, 2008) mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaian standar dan sasaran tersebut.

b) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks dalam (Van Mater dan Van Horn, 1975) bahwa: *"New townstudy suggest that the*

limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.

c) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

d) Komunikasi antar organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater dalam (Widodo, 2008) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus

konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

e) Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2014) "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan".

f) Lingkungan sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

II.1.3 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Dalam proses kebijakan akan selalu kita temukan resiko yang berbeda, tergantung dari konsekuensi yang akan timbul dalam proses pelaksanaannya. Oleh karenanya perlu pertimbangan mendalam sebelum diimplementasikan, begitupun pada saat terlaksana, kebijakan akan selalu dipengaruhi oleh beberapa komponen yang terlibat di dalamnya. Adapun faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya sebuah kebijakan terbagi menjadi dua faktor sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pendapat ahli kebijakan yang didefinisikan oleh Gow dan Morss dalam (Pasolong, 2010: 59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan;
- b. Kelemahan institusi;
- c. Ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan administratif;
- d. Kekurangan dalam bantuan teknis;
- e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi;
- f. Pengaturan waktu (*timing*);
- g. Sistem informasi yang kurang mendukung;
- h. Perbedaan agenda tujuan antar aktor; dan
- i. Dukungan yang berkesinambungan.

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Dalam (Pasolong, 2010:59) hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas *input* yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

Terdapat faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu implementasi kebijakan lainnya menurut (Sunggono, 1994: 149) mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan

dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Hakikatnya dalam suatu implementasi kebijakan pada umumnya, ada beberapa faktor eksternal lain yang biasanya menghambat atau mempersulit implementasi kebijakan yang berasal dari beberapa kondisi. Hal itu dinyatakan menurut (Abidin, 2012: 158) di antaranya yakni:

1. Kondisi fisik;
2. Faktor politik;
3. Tabiat (*attitude*) sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu proses kebijakan dan memaksa melakukan perubahan;
4. Terjadi penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor *input*;
5. Kelemahan salah satu langkah dalam beberapa rangkaian implementasi;
6. Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri.

Dari beberapa pemaparan penghambat implementasi kebijakan di atas, mengartikulasikan bahwa tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna, karena implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekadar merumuskannya. Sebab implementasi kebijakan menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sulit di prediksi. Hal itu disebabkan dalam proses formulasi kebijakan masih sering terjadinya kesenjangan (*Gap*) atau perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. Maka dari itu kesenjangan tersebut harus segera diperbaiki untuk menghindari kesenjangan yang lebih besar ke depannya.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Dalam Implementasi kebijakan terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut, (Dwidjowijoto, 2003: 158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, di mana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2016: 142) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan;
- b. Sumber-sumber kebijakan;
- c. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana;
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- e. Sikap para pelaksana; dan

Lingkungan Sosial dan Politik. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Hogwood dan Gunn dalam (Dwidjowijoto, 2003: 220) memaparkan diantaranya yaitu :

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

- a. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
- b. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- c. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- d. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- e. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- f. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

- g. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- i. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

II.2. Konsep Kurikulum

II.2.1 Pengertian Kurikulum

Kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang berarti berlari dan *currere* yang artinya tempat berpacu. Dalam bahasa Latin "curriculum" semula berarti *a running course, or race course, especially a chariot race course* dan terdapat pula dalam bahasa Prancis "*courier*" artinya "*to run, berlari*". Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah "*courses*" atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Dalam bahasa Arab, kurikulum diartikan dengan *manhaj*, yakni jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan dan kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan, (Machali, I, 2014 : 73).

Kurikulum berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, (Dewi, Yurike.M., 2016: 26).

Rahmat Raharjo dalam (Machali, I., 2014: 73) Istilah kurikulum mempunyai pengertian yang cukup beragam mulai dari pengertian yang sempit hingga yang sangat luas. Pengertian kurikulum secara sempit seperti yang dikemukakan oleh William B. Ragan yang dikutip oleh Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto: *"Traditionally, the curriculum has meant the Subject taught in school, or course of study"*. Senada dengan definisi ini, Carter V. Good dalam (Machali, I., 2014: 73) menyatakan:

"Curriculum as a systematic group of courses or sequences of subject required for graduation or certification in a major field of study, for example, social studies curriculum, physical education curriculum...". Ronald C. Doll mendefinisikan: *"The curriculum of the school is the formal and informal content and process by which learner gain knowledge understanding develop skills and alter attitude appreciations and values under the auspice of that school"*.

Beberapa Pengertian kurikulum sebagaimana di atas mencakup semua pengalaman yang diharapkan dikuasai peserta didik di bawah bimbingan para guru. Pengalaman ini bisa bersifat intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler, baik pengalaman di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum mencakup pengertian yang sangat luas meliputi apa yang disebut dengan kurikulum potensial, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi atau *hidden curriculum*. Kurikulum tersembunyi adalah hal

atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut mempengaruhi perkembangan peserta didik, namun tidak diprogramkan dalam kurikulum potensial. Dalam pengertian lain kurikulum tersembunyi adalah hasil; dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul dari luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru.

II.2.2 Pengertian Kurikulum 2013

Kemendikbud (2013), kurikulum tahun 2013 adalah rancang bangun pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik, bertujuan untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang bermartabat, beradab, berbudaya, berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian di atas, Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang mulai aktif diterapkan pada tahun 2013 sampai sekarang.

II.2.3 Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013

Menurut (Mulyasa, E., 2016: 65) bahwa seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif; melalui pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasikan.

Dalam kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat di demonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang di pelajarnya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

mengacu pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, bagian umum dikatakan, bahwa: *“strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:....., 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi,.... ”* dan pada penjelasan pasal 35, bahwa *“Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan*

dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. "Maka diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk "Melanjutkan Pengembangan kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu."

Untuk mengetahui tujuan tersebut menuntut perubahan pada berbagai aspek lain terutama dalam implementasinya di lapangan pada proses pembelajaran, dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu, sedangkan pada proses penilaian, dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian *output* menjadi berbasis kemampuan melalui penilaian proses, portofolio dan penilaian *output* secara utuh dan menyeluruh, sehingga memerlukan penambahan jam pelajaran.

II.3. Kerangka Pikir

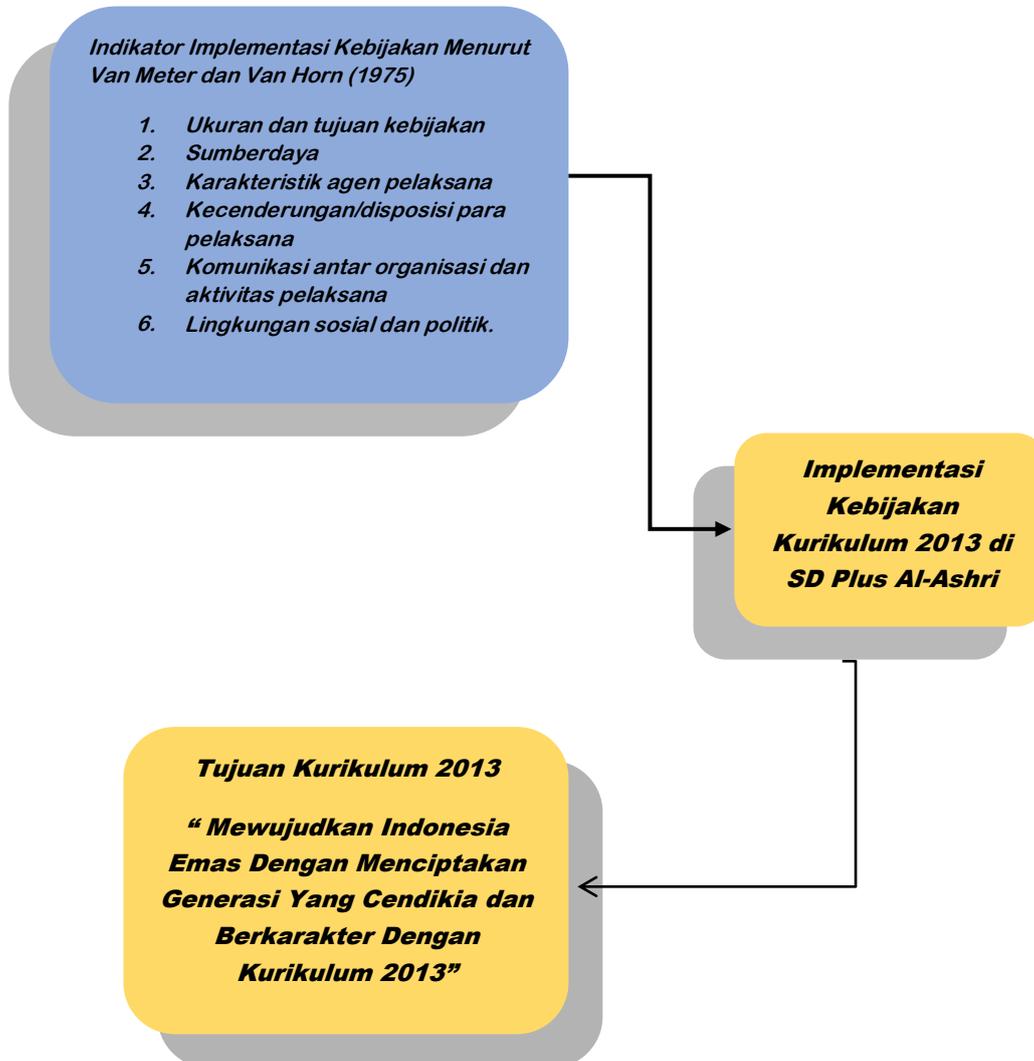
Implementasi kebijakan adalah tolak ukur dari tingkat keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah yang telah dilaksanakan. Hasil ini berkaitan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggaraan kebijakan. Keberhasilan sebuah kebijakan ditunjukkan dengan berkurangnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam suatu program khususnya, sedangkan jika mengalami peningkatan maka perlu dikaji ulang tentang kebijakan yang telah digulirkan atau yang telah dilaksanakan apakah mendapat dukungan atau tidak dari masyarakat atau memang tidak sejalan dan

bertolak belakang dengan program-program pemerintah yang sebelumnya, sehingga menimbulkan masalah, hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Kurikulum tahun 2013 merupakan salah satu konsep kebijakan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi peserta didik dan bertujuan untuk mewujudkan generasi emas bangsa Indonesia yang dicita-citakan selama ini. Kurikulum ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Maka dari itu pemerintah Kota maupun Kecamatan dalam hal ini dinas terkait seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan kurikulum 2013 sebelum mengimplementasikannya. Sebagai hasil dari Kurikulum tersebut maka diharapkan mampu untuk menghasilkan generasi yang cerdas, berkompeten, dan berkarakter.

Untuk dapat mengetahui pencapaian implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Plus Al-Ashri Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, maka peneliti memilih untuk menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari enam variabel (ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan sosial dan politik) untuk memaparkan implementasi kebijakan tersebut. Sehingga kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir



(Sumber; Teori Van Meter dan Van Horn dalam Dwidjowijoto, 2003: 167)